

# KESENJANGAN PENDAPATAN DAN STABILITAS BERAGAMA

*INCOME GAP AND RELIGIOUS STABILITY*

**Muhammad Abrar Kasmin Hutagalung**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Potensi Utama

E-mail: muhammadabrarkasminhutagalung@gmail.com

## **ABSTRAK**

*Data statistik menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi memburuk dari tahun 2015 hingga 2016. Pada tahun 2016, kesenjangan ekonomi mengklasifikasikan populasi menjadi 40% dari pendapatan rendah, 40% dari pendapatan menengah dan 20% dari pendapatan tinggi. Kemudian milik pendapatan US 2.198,06, dan pendapatan rendah US 497,88. Kesenjangan ekonomi sangat mempengaruhi munculnya konflik sosial. Terutama terjadi di daerah-daerah tertentu di mana komunitas memiliki struktur ekonomi yang lemah. Di wilayah ini, konflik antar etnis berpotensi meledak kapan saja. Kesenjangan ekonomi tentu bisa tumbuh menjadi konflik antara pengikut agama, karena pengklasifikasian di atas tidak hanya berurusan dengan etnis tertentu, tetapi juga agama. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan ekonomi kesenjangan ekonomi dapat mempengaruhi keharmonisan kehidupan beragama di Indoneia.*

*Kata Kunci : Kesenjangan Pendapatan; Stabilitas Beragama*

## **ABSTRACT**

*The statistical data show that an economic gap grew worse from 2015 to 2016. In 2016, the economic gap classified the population into 40% of low income, 40% of middle income and 20% of high income. The later belongs to the income of US 2.198.06, and the low income of US 497,88. The economic gap influenced the emergence of the social conflicts very much. It especially happened in certain regions where the community have the weak economic structure. In these regions, the conflicts between ethnics are potential to burst at any time. The economic gap can certainly grow into the conflict between the religious followers, because the classufication above deals not only with a certain ethnic, but also a religion. Therefore, it can be concluded that the economic gap economic gap can influence the harmony of the religious life in Indoneia.*

**Keywords:** *Income Gap; Religious Stability*

## 1. PENDAHULUAN

Kesenjangan ekonomi bisa diartikan dengan kesenjangan dari pendapatan yang dihasilkan satu orang dengan orang lain, satu kelompok dengan kelompok lainnya. Tentunya hal ini tidak terjadi secara instan begitu saja, melainkan melalui proses yang begitu panjang dan sudah ada sejak

dahulu. Kesenjangan ekonomi ini mengakibatkan adanya perlakuan yang berbeda maupun jurang yang begitu dalam antara orang kaya dan orang miskin, kelompok kaya dan kelompok miskin.<sup>1</sup>

Hal ini menjadi kendala tersendiri dalam menciptakan lingkungan sosial yang baik. Lebih parah lagi bila kesenjangan ekonomi ini tidak hanya terjadi secara perlakuan saja, tetapi juga terjadi dalam hal pemenuhan kebutuhan dan penerimaan hak masing-masing individu atau kelompok.

Dari yang seharusnya memiliki kewajiban sama, dengan adanya kesenjangan ekonomi maka bisa saja kewajiban orang kaya lebih ringan daripada orang miskin. Demikian pula dengan hak, bisa jadi orang kaya mendapatkan lebih banyak hak daripada hak yang didapatkan orang miskin, meskipun seharusnya hak keduanya memiliki nilai yang sama.

Kesenjangan ekonomi ini terjadi karena beberapa hal, salah satunya adalah maraknya kemiskinan dan meningkatnya pengangguran di setiap tahunnya. Tidak hanya itu saja, ada pula sikap monopoli atas kelompok kuat terhadap kelompok lemah sehingga orang kaya akan semakin kaya, dan orang miskin pun akan semakin terpuruk.

Perpecahan juga bisa menjadi faktor pendorong terjadinya kesenjangan ekonomi dalam kehidupan masyarakat, karena perpecahan dapat menimbulkan kecemburuan sosial serta tidak meratanya pembangunan.

Sudah menjadi pendapat umum bahwa kesenjangan ekonomi merupakan salah satu sumber utama kecemburuan sosial yang sewaktu-waktu dapat menyebabkan terjadinya konflik SARA (suku, ras, agama, dan antara golongan) atau mengganggu kerukunan hidup beragama. Beberapa peristiwa konflik SARA yang terjadi di tanah air sering dihubungkan dengan lemahnya kerukunan hidup beragama yang disebabkan oleh masalah kesenjangan sosial. Seperti yang dikemukakan Prof. Dr. Amien Rais, kerusuhan yang berbau SARA seperti pembakaran rumah ibadah mempunyai dua akar permasalahan, yakni kesenjangan sosial yang sangat mendalam dan kondisi rakyat yang mirip rumput kering. Dengan demikian dinyatakan bahwa pemerataan pendapatan yang baik merupakan faktor pendukung kerusuhan hidup beragama.<sup>2</sup>

Sementara itu pengalaman sejumlah Negara sudah membuktikan bahwa pembangunan ekonomi akan mendorong kenaikan taraf hidup yang cepat bagi sebagian kecil masyarakat yang menguasai asset ekonomi. Sedangkan bagi mayoritas penduduk yang tidak menguasai asset ekonomi meskipun mengalami kenaikan pendapatan, tetap jauh tertinggal di belakang. Dengan kata lain, pada tahap awal pembangunan ekonomi biasanya ditandai oleh suatu keadaan dimana kesenjangan pendapatan makin lebar antara kelompok miskin dan kaya. Oleh sebab itu, bagi sebuah negara sedang membangun seperti Indonesia, terdapat kemungkinan munculnya persoalan konflik SARA yang disebabkan oleh kesenjangan ekonomi. Apalagi pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dibarengi oleh proses pemerataan yang memadai.

Keterkaitan pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan kemiskinan dalam pembangunan ekonomi disebabkan oleh suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan dalam sistem kelembagaan.

---

<sup>1</sup> Rofiq, Annur. *Kemajuan Ekonomi Indonesia: Isu Strategis, Tantangan, Dan Kebijakan*. (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2013) h. 31.

<sup>2</sup> Rais, M. Amien, *Tauhid Sosial, Formula Menggempur Kesenjangan* (Mizan : Bandung, 1998) h. 16.

Dalam pembangunan ekonomi suatu negara dikatakan berhasil jika pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan berkurangnya ketimpangan pendapatan. Dengan berkurangnya ketimpangan pendapatan, kemiskinan penduduk di suatu negara akan berkurang. Ketimpangan pembagian pendapatan di negara berkembang telah menjadi perhatian utama dalam menetapkan kebijakan pembangunan, karena kebijakan yang hanya memfokuskan terhadap pertumbuhan ekonomi mengakibatkan meningkatnya ketimpangan pendapatan yang akan memperbanyak jumlah penduduk miskin.

Pemerataan distribusi pendapatan nilainya berkisar antara 0 sampai 1, jika nilai indeks gini satu maka kesenjangan pendapatan semakin besar, sedangkan jika mendekati nol kesenjangan pendapatan semakin kecil atau distribusi pendapatan semakin merata. Dalam menghitung ketidakmerataan pendapatan, yaitu melalui mengeluarkan konsumsi rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran konsumsi makan, minum, dan tembakau selama seminggu dan pengeluaran bukan makanan selama sebulan.

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari setiap tahunnya menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Dampak positif dari pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan adil dan merata untuk semua masyarakat, yang tercermin dalam strategi pembangunan Indonesia yaitu *pro-growth, pro-job, dan pro-poor* atau *triple track strategy*. Dari tahun 2009-2013, perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan dengan rata-rata 5,86 persen. Tapi di tahun 2009 perekonomian Nasional mengalami perlambatan yang cukup signifikan yaitu 4,6% dari yang sebelumnya pada tahun 2008 sebesar 6%. Perlambatan ini disebabkan oleh krisis global yang berdampak pada kontraksi ekspor impor karena menurunnya pertumbuhan dan volume perdagangan dunia, sehingga Indonesia melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 menjadi 6,5%, tapi pada tahun 2012 mengalami perlambatan sebesar 6,2 % dan terus melambat hingga 5,8% pada tahun 2013.<sup>3</sup>

Tulisan ini akan membahas perihal kesenjangan pendapatan dalam perspektif kerukunan beragama. Pada bagian berikut akan diulas mengenai ukuran kesenjangan yang lazim dipakai dalam pembahasan ekonomi pembangunan. Berikut akan dibahas mengenai kesenjangan ekonomi di Indonesia.

Dengan bagian akhir ialah kesimpulan dan saran yang dapat ditempuh agar kesenjangan tidak menjadi sumber kecemburuan ekonomi yang dapat mengancam kerukunan hidup beragama, baik antar sesama umat dan antara umat beragama dengan pemerintah selaku penggerak dan pengawas pembangunan ekonomi.

## 2. METODE PENELITIAN

Ketimpangan ekonomi adalah perbedaan pembangunan ekonomi antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan disparitas atau ketidak pemerataan pembangunan. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi daerah adalah untuk mengurangi ketimpangan (*disparity*). Peningkatan pendapatan per kapita memang menunjukkan tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah. Namun meningkatnya pendapatan per kapita tidak selamanya menunjukkan bahwa distribusi pendapatan lebih merata. Seringkali di negara-negara berkembang dalam perekonomiannya lebih menekankan penggunaan modal dari pada tenaga kerja sehingga keuntungan dari perekonomian tersebut hanya dinikmati sebagian masyarakat saja. Apabila ternyata pendapatan nasional tidak dinikmati

---

<sup>3</sup> Tambunan, Tulus: *Perekonomian Indonesia*. (Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 2014). h. 23

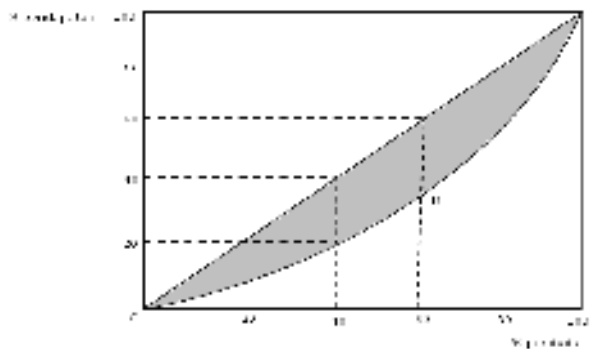
secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi ketimpangan.

Terdapat berbagai macam alat yang dapat dijumpai dalam mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan penduduk (*Distribution Income Disparities*), diantaranya yaitu :

a. Kurva Lorenz (*Lorenz Curve*)

Kurva Lorenz secara umum sering digunakan untuk menggambarkan bentuk ketimpangan yang terjadi terhadap distribusi pendapatan masyarakat. Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase penerima pendapatan dengan persentase pendapatan total yang benar-benar mereka terima selama periode tertentu, misalnya, satu tahun.

Kurva Lorenz digambarkan pada sebuah bidang persegi/bujur sangkar dengan bantuan garis diagonalnya. Garis horizontal menunjukkan persentase penduduk penerima pendapatan, sedangkan garis vertikal adalah persentase pendapatan. Semakin dekat kurva ini dengan diagonalnya, berarti ketimpangan semakin rendah dan sebaliknya semakin melebar kurva ini menjauhi diagonal berarti ketimpangan yang terjadi semakin tinggi.<sup>4</sup>



Gambar 1. Kurva Lorenz

b. *Gini Index/Gini Ratio*

*Gini index* adalah ukuran ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna).

Menurut Gini setiap kurva Lorenz dapat dihitung nilai angkanya yang selanjutnya disebut angka Gini dengan cara membagi luas yang dibentuk kurva Lorenz tersebut dengan total pendapatan. Maksimum dan minimum nilai G adalah :  $0 \leq G \leq 1$ .

Untuk menghitung *Gini Index* yaitu :

$$G = 1 - \sum_{i=1}^n (P_{i-1} - P_i)(Q_{i-1} + Q_i) \dots$$

dimana :

G = *Gini Index*

$P_i$  = Persentase kumulatif jumlah penduduk sampai kelas ke- $i$   $Q_i$  =

Persentase kumulatif jumlah pendapatan sampai kelas ke- $i$   $I =$

1,2,3,...n

G = 0, *Perfect Equality*

G = 1, *Perfect Inequality*

<sup>4</sup> Todaro, Michael P, dan Stephen C. Smith. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga

c. *Regional Income Disparities*

Ketimpangan yang terjadi tidak hanya terhadap distribusi pendapatan masyarakat, akan tetapi juga terjadi terhadap pembangunan antar daerah di dalam wilayah suatu negara. Jeffrey G. Williamson (1965) meneliti hubungan antara disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi negara yang sudah maju dan yang sedang berkembang. Ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih “matang”, dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tampak adanya keseimbangan antardaerah dan disparitas berkurang dengan signifikan. Williamson menggunakan *Williamson Index* (Indeks Williamson) untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah.<sup>5</sup> Indeks Williamson menggunakan PDRB per kapita sebagai data dasar. Alasannya jelas bahwa yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah bukan tingkat kesejahteraan antar kelompok. Formulasi Indeks Williamson secara statistik adalah sebagai berikut :

$$cv_w = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - \bar{y})^2 f_i / n}}{\bar{y}}$$

W = Indeks Williamson

$y_i$  = PDRB per kapita kabupaten/kota  $i$

$y'$  = Rata-rata PDRB per kapita Provinsi

$P_i$  = Jumlah penduduk kabupaten/kota  $i$

$P$  = Jumlah penduduk Provinsi

Angka koefisien Indeks Williamson adalah  $0 < IW < 1$ . Jika Indeks Williamson semakin kecil atau mendekati nol menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil atau semakin merata dan sebaliknya angka yang semakin besar menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar. Walaupun indeks ini memiliki kelemahan yaitu sensitive terhadap defenisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan artinya apabila ukuran wilayah yang digunakan berbeda maka akan berpengaruh terhadap hasil perhitungannya, namun cukup lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Untuk melihat atau menganalisis keadaan pemerataan di suatu Negara dapat digunakan beberapa pendekatan. Satu diantaranya ialah distribusi pendapatan perorangan (*personal distribution*), yakni suatu indikator yang memperlihatkan total pendapatan yang diterima perorangan atau rumah tangga yang didasarkan pada pengelompokan tertentu seperti 5%, 10% dan 20% dari total penduduk.<sup>6</sup> Misalnya ada 100 orang individu atau rumah tangga. Pendapatan mereka diurut mulai yang paling rendah hingga paling tinggi. Kemudian dibagi menjadi 10 kelompok pendapatan masing-masing 10 individu, yakni:

- a. 10% lapisan tertinggi ke-1
- b. 10% lapisan tertinggi ke-2
- c. 10% lapisan tertinggi ke-3
- d. 10% lapisan tertinggi ke-4
- e. 10% lapisan tertinggi ke-5
- f. 10% lapisan tertinggi ke-5
- g. 10% lapisan tertinggi ke-4

<sup>5</sup> Suparmoko, M. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah, Edisi Pertama*. (Penerbit Andi Yogyakarta, 2002) h. 17.

<sup>6</sup> Sadono Sukirno. *Mikro Ekonomi*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006). h. 27.

- h. 10% lapisan tertinggi ke-3
- i. 10% lapisan tertinggi ke-2 dan
- j. 10% lapisan tertinggi ke-1

Dengan pendekatan ini bisa diketahui beberapa persentase bagian masing-masing kelompok mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Berdasarkan data yang demikian maka dapat disimpulkan, apakah kesenjangan di suatu negara tergolong tinggi, sedang atau rendah.

1. 20% penduduk sebagai pendapatan tertinggi
2. 40% penduduk sebagai golongan berpendapatan menengah.
3. 40% penduduk sebagai golongan berpendapatan terendah

Dengan mengelompokkan penduduk yang demikian maka kriteria ketimpangan atau kesenjangan dikatakan:

1. *Ketimpangan tinggi* apabila 40% penduduk berpendapatan terendah menerima kurang dari 12% pendapatan nasional.
2. *Ketimpangan sedang* apabila 40% penduduk berpendapatan terendah menerima antara 12-17% pendapatan nasional.
3. *Ketimpangan rendah* apabila 40% penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17% pendapatan nasional.

Pendekatan lainnya adalah dengan menggunakan *koefisien Gini*, yaitu suatu koefisien yang besarnya terletak antara angka 0 (nol) hingga 1 (satu). Angka Gini yang semakin mendekati nol berarti pemerataan semakin baik dan apabila kian mendekati satu menunjukkan pemerataan semakin timpang. Untuk mendapatkan angka *Koefisien Gini* dapat ditaksir dengan menggunakan *Kurva Gini Lorenz* ataupun dengan menggunakan arah matematis (metode perhitungan teknisnya tidak dibahas dalam makalah ini).

Ketidak merataan ataupun kesenjangan dapat pula dianalisis dari aspek-aspek lainnya, seperti ketidakmerataan antar daerah, antar kota dan antar desa, antar sektor, berdasarkan Indeks Mutu Hidup (PQLI) dan perbedaan daya beli. Malahan, dengan menggunakan ukuran *Koefisien Gini* dan ukuran Relatif dapat dibuat suatu perbandingan untuk melihat bagaimana tingkat pemerataan antara satu daerah dengan daerah lain, antara desa dengan kota, antara satu desa dengan desa lain, dan antara suatu sektor dengan sektor yang lainnya.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum dapat dinyatakan bahwa perbedaan pendapatan pada gilirannya akan menyebabkan perbedaan pola konsumsi. Sudah menjadi "hukum alam", biasanya kenaikan pendapatan akan diikuti oleh kenaikan konsumsi. Berhubung karena kenaikan pendapatan pada lapisan atas biasanya tinggi, maka pola konsumsinya pun meningkat tajam dan sering demonstratif yang sama akan menyebabkan orang akan membandingkan keadaan dirinya dengan keadaan orang lain, ataupun oleh kelompok yang satu dengan terhadap kelompok lainnya.

Dari perbandingan tadi akan tumbuh dua kemungkinan, yakni satu merasa "lebih" atas "di atas" orang lain, dan satu lagi merasa "kurang" atau "dibawah" orang lain. Dari perasaan "di bawah" orang lain akan tumbuh pula rasa kecemburuan kurang puas, rasa iri hati atau kecemburuan ekonomi.

Apabila tumbuh kecemburuan ekonomi, niscaya dapat menjadi gangguan terhadap kerukunan hidup masyarakat.

Ketidaksenangan melihat tingkat kesejahteraan atau pola konsumsi individu yang berlangsung lama dalam masyarakat dapat berakumulasi menjadi ketidaksenangan atau ketidakpuasan kolektif. Keadaan ini akan bergerak pada suatu kondisi yang mengganggu kerukunan hidup masyarakat dan bahkan hidup beragama. Bahkan terhadap pemerintah, dan pada pada tahap selanjutnya dapat menjadi sumber gangguan terhadap stabilitas nasional dan merupakan salah satu syarat atau kondisi agar pembangunan dapat dilakukan secara berkesinambungan, baik efektif dan efisien.

Sebagaimana yang telah di singgung di atas kesenangan ekonomi dapat dilihat dengan berbagai cara. Untuk maksud ini secara teratur Biro Pusat Statistik (BPS) telah menerbitkan data resmi yang dapat dilakukan dalam menganalisis sebagaimana sebagaimana keadaan kesenjangan pendapatan di Indonesia.

Koefisien Gini merupakan indikator yang lazim di pakai untuk mendapatkan gambaran umum tentang pola pemerataan di suatu negara, daerah ataupun masyarakat. Apalagi, jika tersedia angka Gini dalam beberapa tahun, maka walupun tidak sempurna tapi memadai untuk melihat kecenderungan perubahannya.

Dengan menggunakan data pengeluaran, hasil sejumlah studi mengenai pendapatan di Indonesia tidak menunjukkan bahwa keadaan kesenjangan ssemakin baik secara konsisten. Sebagaimana gambar disajikan disajikan angka-angka Gini BPS dalam tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan Angka Gini 2002-2016

Tahun	Gini
2002	0,39
2004	0,35
2006	0,33
2008	0,34
2012	0,36
2014	0,34
2016	0,36

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Meskipun sumber data yang dibandingkan dalam tabel 1 tidak seragam, tapi angka-angka Gini yang di perlihatkan dari tahun 2002 hingga tahun 2016 di atas atas dapat menjelaskan bahwa pola polapemerataan cenderung memburuk, atau setidaknya-tidaknya keadaan tak membaik secara konsisten.

Perbandingan kesenjangan di perkotaan dan pedesaan di perlihatkan dalam tabel 2, bahwa kesenjangan di pedesaan lebih bail dibandingkan dengan dengan kesenjangan perkotaan.

Tabel 2. Angka Gini Desa-Kota

Tahun	Kota	Desa
2005	0,34	0,25
2011	0,33	0,26
2016	0,36	0,27

Sumber. Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan pola kesenjangan yang digambarkan dalam tabel 2 dan kerusuhan sosial yang akhir-akhir ini terjadi umumnya di perkotaan, kelihatannya konflik yang akhirnya dianggap sebagai kerusuhan karena SARA tidak terlepas dari substansi persoalan kesenjangan.

Selanjutnya dengan menggunakan data pengeluaran hasil survey BPS, dapat dilihat gambaran pemerataan berdasarkan persentase yang di terima oleh 20% penduduk kelompok tertinggi, 40% penduduk kelompok menengah, dan 40% penduduk kelompok terendah.

Data resmi pemerintah menunjukkan, pada tahun 1990 persentase pendapatan yang diterima oleh 40% lapis bawah dan 40% penduduk lapis menengah berkurang, masing-masing 1,70% dan 1,15%. Sedangkan persentase pendapatan yang diterima oleh 20% penduduk lapisan atas justru meningkat 2,26% (tabel 3).

Tabel 3. *Perubahan Persentase Pendapatan Golongan Masyarakat.*

Lapisan Masyarakat	Pendapatan Nasional Yang Di Terima
a. 20% Lapisan Atas	41,44%
b. 40% Lapisan Menengah	36,75%
c. 40% Lapisan Bawah	21,30%

*Sumber: Disederhanakan dari Berbagai Sumber*

Dalam pada itu secara absolut dapat pula dilihat bagaimana perbandingan pendapatan perkapita penduduk golongan atas, golongan menengah dan golongan bawah. Untuk maksud ini dapat digunakan data-data resmi jumlah penduduk dan pendapatan nasional (PDB) yang sudah acapkali dipublikasikan di media massa.

Tabel 4. *Pendapatan Per Kapita Tahun 2016 Berdasarkan Golongan*

Golongan Masyarakat	%PDB	Penduduk (Juta Jiwa)	Bagian PDB (Juta US\$)	Per Kapita (US\$)
20% Tertinggi	44,70	38,66	84.976,94	2.198,06
40% Menengah	35,05	77,32	66.631,80	861,77
40% Terendah	20,25	77,32	38.486,26	497,88
Nasional	100,00	193,30	190.105,00	980,00

*Sumber: Diolah dari berbagai sumber*

Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa pendapatan sebagian besar (154,64 juta), penduduk Indonesia Indonesia ialah di bawah pendapatan perkapita nasional, yakni hanya US\$ 97 untuk golongan terendah dan S\$ 861,77 golongan menengah. Sedangkan pendapatan rata-rata 20% penduduk golongan tertinggi jauh di atas pendapatan perkapita nasional, yakni US\$ 2.198,06 berbanding dengan US\$ 980,00.

Untuk melihat bagaimana gambaran umum kesenjangan di daerah tingkat I, dalam tabel 5 disajikan bagaimana keadaan kesenjangan pendapatan di setiap provinsi Indonesia berdasarkan kriteria Bank Dunia.



Dengan menggunakan data pengeluaran diperoleh data bahwa di 9 dari 27 provinsi menunjukkan kesenjangan yang cukup lebar, dimana 20% penduduk golongan atas menerima lebih dari 40% pendapatan regional (dalam tabel bercetak miring). Secara keseluruhan lapisan tas ini menerima 42,4% pendapatan nasional. Dengan demikian, walaupun lapisan bawah menerima 20,5% pendapatan nasional, tetapi sebenarnya tingkat kesenjangan absolute antar penduduk kelompok terendah dan penduduk kelompok tertinggi sangat mencolok.

Tabel 5. Pola Pemerataan Menurut Kelompok Penduduk Berdasarkan Provinsi Tahun 2002

No	Provinsi	40% Terendah	40% Menengah	20% Tertinggi
1.	Aceh	22,9	37,5	39,6
2.	Sumut	22,4	38,3	39,3
3.	Sumbar	21,8	37,7	40,5
4.	Riau	23,5	39,2	37,3
5.	Jambi	25,2	40,3	34,6
6.	Sumsel	22,5	38,4	39,1
7.	Bengkulu	24,0	37,2	38,8
8.	Lampung	24,7	37,8	37,5
9.	Jakarta	21,1	36,5	42,3
10	Jabar	22,3	37,6	40,1
11	Jateng	23,3	37,1	39,6
12	Jogyakarta	21,0	36,0	42,9
13	Jatim	22,4	37,8	41,6
14	Bali	21,4	34,5	40,8
15	NTB	24,5	38,4	38,6
16	NTT	25,7	38,6	36,8
17	Banten	20,9	38,5	44,6
18	Kabar	22,1	38,0	39,5
19	Kalteng	24,4	40,2	36,9
20	Kalsel	23,5	38,9	38,0
21	Kaltim	21,7	38,0	40,3
22	Sulut	22,0	40,2	37,8
23	Sulteng	23,0	38,9	38,1
24	Sulsel	24,1	38,4	37,5
25	Sultera	24,5	37,7	38,9
26	Maluku	21,2	39,9	43,7
27	Papua	17,4	38,9	42,4
28	Total	20,5	37,3	42,4

Sumber: BPS Tahun 2013, disederhanakan.

Untuk melihat lebih jelas bagaimana kesenjangan absolute terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dapat dilihat pada perbedaan harga-harganya barang konsumsi tertentu yang kehidupan sehari-hari. Untuk memberikan contoh sederhana, lihat saja perbedaan harga makanan dan minuman di kota-kota besar. Misalnya, di Coffee Shop hotel berbintang 4 harga segelas teh bisa mencapai Rp. 25.000,- sementara di warung rakyat harganya bisa Cuma Rp. 5.000,-. Demikian juga tarif makanan siang di

sebuah Restoran Padang Mewah masih dianggap wajar apabila rata-rata Rp. 100.000 per orang, sedangkan di Warung Padang Sederhana sudah bisa puas makan siang.<sup>7</sup>

Benar bahwa di tempat mewah konsumen diberi fasilitas (misalnya ber AC) dan pelayanan yang boleh dikatakan ibarat melayani seorang raja. Sedangkan di warung pinggir jalan semuanya sangat bersahaja. Oleh karena itu, perbedaan harga yang terdapat perbedaan fasilitas dan pelayanan.

Persoalannya adalah apabila dipertanyakan perbedaan tingkat pendapatan pelayanan di “restoran mewah” dan di “restoran sederhana”, tidak akan jauh berbeda. Hal ini sekaligus menunjukkan betapa kesenjangan absolute antara pengusaha atau eksekutif restoran mewah yang masuk dalam 20% penduduk golongan tertinggi dan pekerja (pelayan) yang masuk dalam 40% penduduk golongan terendah.

Melihat data diatas dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa di daerah-daerah yang pola konsumsi golongan tertinggi masyarakat mencolok niscaya lebih rawan gejolak sosial. Saya berpendapat, pola pengeluaran penduduk golongan tertinggi yang mencolok dibandingkan dengan golongan terendah dan menengah merupakan sumber kecemburuan ekonomi, dan ini dapat menimbulkan gejolak sosial yang mengganggu kerukunan beragama.

Faktor lain yang perlu dicermati karena dapat menjadi sumber kecemburuan ekonomi ialah pola kepemilikan asset ekonomi nasional dan penguasaan kegiatan bisnis yang di dominasi oleh sekelompok kecil pengusaha. Seperti yang dikemukakan oleh Syaifud Adidharta, sekitar 90% dari perusahaan yang listing di Pasar Modal Indonesia ialah perusahaan milik Non pribumi perantauan.<sup>8</sup>

Secara umum, meskipun populasi Non pribumi perantauan ialah minoritas (3-4% dari total penduduk) tetapi mereka menguasai sebagian besar (70%) kegiatan ekonomi modern. Fenomena yang sama terjadi di Thailand, dengan populasi hanya 3% tetapi mereka menguasai ekonomi sekitar 60% di Filipina dengan populasi 3% menguasain kegiatan ekonomi 70%, dan di Malaysia dengan populasi 30% hnya menguasai sekitar 50% dri kegiatan ekonomi Negara itu.

Majalah Asian Business Riview melaporkan dari 100 orang terkaya di Asia, 15 orang diantaranya ialah dari Indonesia (paling banyak di Asia bersama Malaysia yang juga 15 orang). Dari ke-15 orang terkaya di Asia ada di Indonesia. 13 orang diantaranya ialah keturunan Non pribumi dan menguasai 80% dari seluruh asset 15 konglomerat Indonesia yang masuk Asia’s Top 100 Billionaries itu.

Tabel 6. Konglomerat Indonesia Dari 100 Terkaya Asia Versi *Asian Business Riview 2015*

No	Nama Konglomerat	Perusahaan	Kekayaan US\$ M	Rangking
1	Wonowidjaja	Gudang Garam	7,7	7
2	Liem Sioe Liong	Salim Group	4,5	18
3	Eka Tjipta Widjaja	Sinar Mas Group	3,7	25
4	Putera Sampoerna	Hanjaya M.S	2,3	45

<sup>7</sup> Septian, Remigius, *8 Alasan-Kenapa pada Akhirnya Orang Relu Bayar Mahal untuk Secangkir Kopi*. Diakses pada tanggal 15 Desember 2018 dari <https://www.idntimes.com>

<sup>8</sup> Adidharta, Syaifud *Etnis China Tionghoa Masih Nomor Satu Kuasai Bisnis dan Ekonomi Indonesia* Diakses pada tanggal 15 Desember 2018 dari <https://www.kompasiana.com/>

5	Prajogo Pangestu	Barito Pacific	2,0	49
6	Djuhar Susanto	Salim Group	1,8	56
7	Liem Tek Siong	Gajah Tunggal	1,3	76
8	Mohd. Bob Hasan	Apkindo	1,2	80
9	Sukanto Tanoto	Raja Garuda Mas	1	87
10	Robert B. Hartono	Djarum Group	1	88
11	Mochtar Riady	Lippo Group	1	89
12	William Suryajaya	Astra Group	1	93
13	Hasyim Joyohadikusumo	Semen Cibinong	1	94
14	M.A. Gunawan	Panin Group	1	99

Sumber: *Asian Business Review*, Agustus 2015, disederhanakan

Data yang spesifik Sumatera Utara juga dapat dijadikan indikator lain untuk melihat bagaimana kemungkinan tumbuhnya kecemburuan ekonomi di daerah ini. Data hasil sensus ekonomi (BPS) Sumatera Utara menunjukkan, dari sekitar 1.161.154 usaha menengah dan 17.122 usaha besar dalam tahun 2016, sebagian besar (1.028 atau 63%) beromzet sama dengan atau lebih besar dari Rp. 15962 milyar. Sedangkan yang termasuk usaha kecil adalah 658 perusahaan, dan sebagian besar diantaranya (621 atau 94%) beromzet antara Rp. 50 juta. Sebanyak 37 perusahaan lagi beromzet antara Rp 50 juta hingga Rp. 1 milyar. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang mencolok antara perusahaan beromzet kecil dan yang beromzet besar.<sup>9</sup>

Dari pengamatan sehari-hari di lapangan dengan kasat mata dapat dilihat bahwa mayoritas usaha besar dan menengah yang umumnya beromzet besar ialah pengusaha keturunan Non pribumi atau nonpribumi. Sedangkan mayoritas usaha kecil yang umumnya beromzet kecil ialah pribumi. Kondisi ini juga merupakan salah satu sumber tumbuhnya kecemburuan ekonomi yang kemudian apabila terjadi konflik selalu ditafsirkan sebagai kerusuhan karena SARA dan bermuara pada masalah kerukunan beragama.

Peristiwa pembakaran Wihara di Tanjung Balai Sumatera Utara merupakan pada bulan Juli 2016 merupakan bukti konflik SARA yang berasal dari kecemburuan ekonomi. Sudah menjadi realitas bahwa ekonomi dikuasai non pribumi. Mereka makin lama semakin kaya karena aparat dan kepala daerah bekerja sama dengan mereka. Ini terjadi karena dalam setiap pemilihan kepala daerah (pilkada), mereka terlibat menjadi cukong kepada setiap calon yang bertarung dalam pilkada, sehingga siapapun yang menang dalam pilkada, mereka sudah investasi terlebih dahulu sebagai penyanggah dana dan kepala daerah yang terpilih otomatis merasa berhutang budi kepada mereka.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik, *Jumlah Usaha Perusahaan Menurut Kategori Lapangan Usaha dan Skala Usaha*, Diakses pada tanggal 15 Desember 2018 dari <https://sumut.bps.go.id/statictable/2018/02/07/861/-sensus-ekonomi.html>

<sup>10</sup> Umar, Musni. *Membedah Akar Masalah Konflik SARA di Tanjung Balai, Sumatera Utara*. Diakses pada tanggal 15 Desember 2018 <http://www.kompasiana.com>.

Dampaknya, kepala daerah bekerjasama dengan mereka. Kondisi semacam itu, menyebabkan kesenjangan sosial ekonomi semakin melebar dan masyarakat kemudian marah, benci dan anti terhadap mereka yang kebetulan dari non pribumi.

Selain itu, tumbuh arogansi di kalangan mereka terhadap masyarakat pribumi. Ini penyakit orang kaya yang dilindungi oleh aparat. Mereka tidak lagi *sensitive* – menyaring kata dan kalimat kalau berbicara, sehingga masyarakat memendam kebencian dan kemarahan terhadap mereka. Kasus Melianda, yang marah dan menegur muazzin (orang yang azan – dalam rangka memanggil untuk shalat) dengan menggunakan pengeras suara di Tanjung Balai, Sumatera Utara, segera direspon dengan melampiaskan kemarahan dan kebencian yang sudah lama dipendam dengan membakar Wihara dan Kelenteng yang menjadi tempat beribadah orang-orang Non pribumi.

Tambah lagi, persepsi masyarakat terhadap mereka menjadi sangat negatif karena setiap terjadi masalah, aparat selalu memihak kepada mereka. Kondisi semacam ini menyebabkan muncul teroris dan aparat menjadi target untuk melampiaskan kemarahan, kebencian dan dendam.

Kebijakan dan perlakuan yang mengistimewakan mereka yang kaya merupakan akar permasalahan berikutnya, yang kebetulan adalah non pribumi, telah memancing perasaan tidak adil yang sewaktu waktu diledakkan jika ada masalah sekecil apapun. Dan yang terakhir adalah faktor global yang turut mempengaruhi masyarakat berperilaku temperamental, cepat marah, dan emosi. Selain lima faktor yang dikemukakan di atas, penyebab mudah meledaknya suatu konflik adalah karena masyarakat membentuk klaster, kumpulan, dan kelompok berdasarkan agama, suku, etnik, pekerjaan, dan sebagainya.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Di atas sudah diterangkan secara singkat bahwa pemerataan dianggap baik apabila Angka Gini bergerak mendekati nol dan Kriteria Relatif menunjukkan lebih dari 17% pendapatan nasional diterima oleh 40% penduduk kelompok terendah. Berdasarkan kedua ukuran ini, yakni Gini adalah 0,36 (mendekati nol) dan 40% penduduk terendah menerima 20,05% (lebih besar dari 17%).

Tetapi, dari aspek lain kelihatan bahwa perbedaan pendapatan absolut golongan atas dan bawah sangat mencolok (US\$ 2.198 V US\$ 862 dan 498). Dalam konteks kerukunan hidup bermasyarakat, kondisi ini jelas harus dicermati, karena dapat menjadi sumber kecemburuan ekonomi. Apalagi kalau dicerminkan dalam pola konsumsi yang domonstratif.

Secara makro (baik berdasarkan indeks Gini maupun kriteria Bank Dunia) tingkat kesenjangan di Indonesia relative baik, yakni termasuk dalam kategori Ketimpangan Lunak. Akan tetapi, persentase pendapatan yang diterima penduduk golongan bawah diterima penduduk golongan atas justru meningkat. Keadaan ini juga sangat jelas merupakan hal yang sangat jelas merupakan hal yang sangat rawan bagi merebaknya isu-isu SARA yang dapat mendorong masyarakat seperti rumput kering yang mudah terbakar.

Sebagai penutup ada beberapa langkah yang dapat dilakukan guna mengantisipasi kemungkinan timbulnya kesenjangan ekonomi yang menimbulkan gangguan dan membina kerukunan hidup beragama di Indonesia.

Tadi sudah jelas bahwa kecemburuan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kesenjangan ekonomi, baik dalam pengertian absolut. Oleh sebab itu upaya peningkatan pendapatan di lapis bawah dan

memengah harus dibarengi pula oleh perbaikan pemerataan pendapatan secara substantive. Sedangkan pola konsumsi yang domonstratif di lapis atas hendaknya dapat ditekan atau diperkecil.

Dalam menetapkan strategi pembangunan, harus diingat bahwa sebagian terbesar dari penduduk miskin dan berpendapatan terendah ialah kalangan petani gurem (lahan sempit), petani tanpa lahan, buruh tani, nelayan, buruh industry dan pengusaha kecil baik yang dibidang formal maupun informal. Oleh sebab itu, upaya-upaya untuk memperbaiki keadaan tersebut harus dilakukan secara strategis, terencana dan terprogram.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan penduduk di sector pertanian antarlain ialah melalui pemberian intensif, proteksi dan subsidi sehingga mereka mampu mengikuti dampak pertumbuhan ekonomi di sector modern. Demikian pula dengan program pembangunan jangka pendek seperti IDT, Takesra/Kukesra, GN-OTA dan jarring pengamat sosial dilakukan dengan tepat sasaran dan efisien.

Pembangunan dan pembinaan kalangan usaha kecil yang puluhan juta jumlahnya dapt dilakukan dengan pemberian skema kredit yang mudah dijangkau, pola kemitraan, pembinaan manajemen dan perluaan akses pasar. Dengan demikian usaha kecil dan menengah tumbuh dan berkembang bersama pengusaha besar. Sedangkan dalam konteks peningkatan retribusi of income system perpajakan yang lebih intensif dan progresif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi disektor modern dilaksanakan secara efektif dan bersih dari penyimpangan.

Sebagai penutup perlu ditegaskan kembali bahwa upaya-upaya perbaikan pemerataan pendapatan menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan menciptakan kerukunan hidup beragama.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Rais M. Amien (1998). *Tauhid Sosial, Formula Menggempur Kesenjangan Mizan*, Bandung.
- [2] Rofiq Annur (2013). *Kemajuan Ekonomi Indonesia: Isu Strategis, Tantangan, Dan Kebijakan*. Penerbit IPB Press, Bogor.
- [3] Sukirno Sadono (2006). *Mikro Ekonomi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [4] Suparmoko M (2002). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah, Edisi Pertama*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- [5] Tambunan Tulus (2014), *Perekonomian Indonesia* . Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- [6] Todaro, Michael P, dan Stephen C. Smith (2004). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga, Jakarta.
- [7] Septian Remigius, *8 Alasan-Kenapa pada Akhirnya Orang Rela Bayar Mahal untuk Secangkir Kopi*. Diakses pada tanggal 15 Desember 2018 dari <https://www.idntimes.com>
- [8] Adidharta Syaifud *Etnis Non pribumi Tionghoa Masih Nomor Satu Kuasai Bisnis dan Ekonomi Indonesia* Diakses pada tanggal 15 Desember 2018 dari <https://www.kompasiana.com/>
- [9] Badan Pusat Statistik, *Jumlah Usaha Perusahaan Menurut Kategori Lapangan Usaha dan Skala Usaha*, Diakses pada tanggal 15 Desember 2018 dari <https://sumut.bps.go.id/statictable/2018/02/07/861/-sensus-ekonomi.html>
- [10] Umar Musni. *Membedah Akar Masalah Konflik SARA di Tanjung Balai, Sumatera Utara*. Diakses pada tanggal 15 Desember 2018 <http://www.kompasiana.com>.